Darunnajah *in* Economics
ISSN(Online): XXXX-XXXX
Vol 1 no 1 (2026): March 2026
https://journal.darunnajah.org/index.php/DIEC

Evaluasi Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Berbasis Digital Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Dan Pengentasan Kemiskinan

Muhammad Ali Tamrin
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstrak

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Transformasi digital dalam layanan perbankan membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas penyaluran KUR melalui penyederhanaan prosedur, percepatan proses pengajuan, perluasan jangkauan layanan, dan peningkatan efisiensi administrasi. Namun, efektivitas digitalisasi penyaluran kredit tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses, tetapi juga oleh ketepatan sasaran penerima, keberlanjutan usaha, perlindungan konsumen, serta kontribusinya terhadap inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penyaluran KUR berbasis digital melalui kajian komparatif terhadap 15 artikel jurnal yang membahas KUR, keuangan digital, inklusi keuangan, pembiayaan mikro, dan pengurangan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka komparatif melalui identifikasi tema, perbandingan temuan, dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi memperluas akses pembiayaan, mengurangi biaya transaksi, serta meningkatkan efisiensi pelayanan keuangan. Meskipun demikian, akses pembiayaan tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Dampak KUR terhadap pengentasan kemiskinan bergantung pada penggunaan kredit untuk kegiatan produktif, kapasitas manajerial pelaku usaha, literasi keuangan digital, akses pasar, dan kualitas pendampingan. Oleh karena itu, efektivitas KUR berbasis digital perlu dievaluasi melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan indikator aksesibilitas, efisiensi operasional, ketepatan sasaran, keberlanjutan usaha, inklusi keuangan, dan perubahan kesejahteraan penerima.

Kata kunci: Kredit Usaha Rakyat, digitalisasi keuangan, inklusi keuangan, UMKM, pengentasan kemiskinan..

Abstract

People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat or KUR) is one of the Indonesian government's policy instruments for expanding access to financing for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Digital transformation in banking services creates opportunities to improve the effectiveness of KUR distribution by simplifying procedures, accelerating application processing, expanding service coverage, and increasing administrative efficiency. However, the effectiveness of digital credit distribution depends not only on ease of access but also on the accuracy of beneficiary targeting, business sustainability, consumer protection, and its contribution to financial inclusion and poverty alleviation. This study aims to evaluate the effectiveness of digital-based KUR distribution through a comparative review of 15 journal articles discussing KUR, digital finance, financial inclusion, microfinance, and poverty reduction. The study employs a qualitative approach using a comparative literature review method involving thematic identification, comparison of findings, and conceptual synthesis. The findings indicate that digitalization has the potential to expand access to financing, reduce transaction costs, and improve the efficiency of financial services. Nevertheless, access to financing does not automatically lead to improved well-being. The impact of KUR on poverty alleviation depends on the productive use of credit, the managerial capacity of business owners, digital financial literacy, market access, and the quality of business assistance. Therefore, the effectiveness of digital-based KUR should be evaluated through a multidimensional approach incorporating indicators of accessibility, operational efficiency, beneficiary targeting accuracy, business sustainability, financial inclusion, and changes in beneficiaries' well-being.

Keywords: People's Business Credit (KUR), financial digitalization, financial inclusion, MSMEs, poverty alleviation.

Darunnajah *in* Economics
ISSN(Online): XXXX-XXXX
Vol 1 no 1 (2026): March 2026
https://journal.darunnajah.org/index.php/DIEC

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran strategis dalam perekonomian karena menjadi sumber kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan rumah tangga. Meskipun demikian, keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi salah satu kendala pengembangan usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan agunan, dokumentasi keuangan, legalitas usaha, dan rekam jejak kredit. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, dan mempertahankan keberlanjutan usaha.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai skema pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha produktif memperoleh akses kredit dari lembaga keuangan. Program ini memiliki relevansi dengan agenda inklusi keuangan karena berupaya memperluas akses kelompok usaha yang sebelumnya menghadapi hambatan dalam memperoleh pembiayaan formal. Penelitian mengenai pelaksanaan KUR pada tingkat lokal menunjukkan bahwa program ini dapat membantu memenuhi kebutuhan modal dan mendukung perkembangan usaha. Namun, kendala administrasi dan penyebaran informasi masih dapat menghambat optimalisasi penyalurannya (Mustofa et al., 2024).

Perkembangan teknologi keuangan atau financial technology (fintech) membawa perubahan dalam mekanisme pelayanan lembaga keuangan. Digitalisasi memungkinkan pemanfaatan aplikasi pengajuan kredit, verifikasi identitas elektronik, pengumpulan dokumen digital, sistem informasi debitur, serta pemantauan pembiayaan melalui sistem terintegrasi. Dalam konteks penyaluran KUR, teknologi tersebut berpotensi mengurangi hambatan geografis dan administratif, terutama bagi pelaku usaha yang tinggal jauh dari kantor layanan perbankan.

Kajian Ha et al. (2025) menunjukkan bahwa fintech telah menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan inklusi keuangan. Akan tetapi, penelitian tersebut juga mengidentifikasi perlunya bukti yang lebih kuat mengenai dampak nyata teknologi keuangan dan peran regulasi dalam memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, keberadaan layanan digital belum cukup untuk membuktikan bahwa akses keuangan telah meningkat secara merata atau bahwa kesejahteraan penerima pembiayaan telah membaik.

Hubungan antara layanan keuangan digital dan pengentasan kemiskinan juga tidak bersifat otomatis. Suri dan Jack (2016), melalui penelitian mengenai layanan uang elektronik M-PESA di Kenya, menemukan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan digital berkaitan dengan peningkatan konsumsi per kapita dan penurunan kemiskinan ekstrem. Dampak tersebut dikaitkan dengan peningkatan kemampuan rumah tangga dalam menghadapi guncangan ekonomi, menabung, dan melakukan perubahan kegiatan ekonomi. Temuan ini memberikan landasan bahwa layanan keuangan digital dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan apabila akses tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam perilaku ekonomi.

Namun, bukti mengenai pembiayaan mikro memperlihatkan hasil yang lebih beragam. Banerjee et al. (2015), melalui evaluasi eksperimental program kredit mikro di Hyderabad, India, menemukan peningkatan investasi usaha dan keuntungan pada sebagian usaha yang telah berjalan, tetapi tidak menemukan peningkatan konsumsi yang signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dapat membantu aktivitas ekonomi tertentu tanpa serta-merta menghasilkan perubahan kesejahteraan yang luas dalam jangka pendek.

Persoalan tersebut menjadi penting ketika KUR berbasis digital dinilai hanya berdasarkan jumlah pengajuan, besarnya penyaluran kredit, atau kecepatan pelayanan. Indikator tersebut memang dapat menunjukkan kinerja operasional, tetapi belum cukup untuk menilai apakah pembiayaan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan,

Darunnajah *in* Economics
ISSN(Online): XXXX-XXXX
Vol 1 no 1 (2026): March 2026
https://journal.darunnajah.org/index.php/DIEC

digunakan untuk kegiatan produktif, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Penelitian Tay et al. (2022) menegaskan bahwa inklusi keuangan digital berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi masih menghadapi kesenjangan akses dan penggunaan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, laki-laki dan perempuan, serta masyarakat perkotaan dan perdesaan. Karena itu, digitalisasi perlu disertai penguatan infrastruktur, penyederhanaan prosedur, dan pendidikan keuangan.

Berdasarkan persoalan tersebut, evaluasi KUR berbasis digital perlu menghubungkan tiga dimensi utama, yaitu efektivitas penyaluran kredit, perluasan inklusi keuangan, dan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Ketiganya saling berkaitan, tetapi mempunyai indikator dan mekanisme pengaruh yang berbeda. Penyaluran yang cepat belum tentu tepat sasaran; akses terhadap kredit belum tentu menghasilkan usaha yang menguntungkan; dan peningkatan pendapatan usaha belum tentu secara langsung mengangkat rumah tangga dari kemiskinan.

Kajian terdahulu dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang. Pertama, penelitian mengenai efektivitas KUR berfokus pada pelaksanaan program, akses modal, dan perkembangan UMKM. Kedua, penelitian mengenai keuangan digital menelaah peran teknologi dalam memperluas akses layanan keuangan dan mengurangi hambatan transaksi. Ketiga, penelitian mengenai pembiayaan mikro dan kemiskinan menguji apakah akses terhadap kredit menghasilkan perubahan pendapatan, konsumsi, dan kesejahteraan.

Ketiga bidang tersebut memberikan dasar konseptual yang saling melengkapi. Namun, kajian komparatif yang secara khusus menghubungkan digitalisasi penyaluran KUR dengan efektivitas operasional, inklusi keuangan, dan pengentasan kemiskinan masih perlu dikembangkan. Oleh sebab itu, artikel ini mengintegrasikan temuan dari literatur KUR, fintech, inklusi keuangan, dan pembiayaan mikro untuk membangun kerangka evaluasi yang lebih komprehensif.

Penting ditegaskan bahwa kajian ini tidak mengasumsikan seluruh proses KUR telah terdigitalisasi secara menyeluruh. Digitalisasi dapat diterapkan pada tahap tertentu, seperti penyampaian informasi, pengajuan, verifikasi, pemantauan, atau pembayaran. Tingkat digitalisasi aktual perlu dibuktikan melalui data pelaksanaan program dan karakteristik masing-masing lembaga penyalur.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektivitas penyaluran KUR berbasis digital dari aspek aksesibilitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran. Mengevaluasi kontribusi digitalisasi KUR terhadap perluasan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM. Menganalisis mekanisme yang menghubungkan pembiayaan KUR dengan pengembangan usaha dan pengentasan kemiskinan. Mengidentifikasi hambatan dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran KUR berbasis digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur komparatif untuk menganalisis efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis digital dalam mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. Studi literatur dilakukan dengan menelaah hasil penelitian terdahulu yang relevan, mengidentifikasi tema-tema utama, serta membandingkan temuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Kajian mengenai aksesibilitas KUR menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembiayaan masih menghadapi tantangan dalam menjangkau pelaku usaha mikro secara optimal (Suryawati et al., 2024). Selanjutnya, hasil penelitian mengenai layanan keuangan digital menunjukkan bahwa adopsi layanan keuangan digital dan inklusi keuangan berkaitan

Darunnajah *in* Economics
ISSN(Online): XXXX-XXXX
Vol 1 no 1 (2026): March 2026
https://journal.darunnajah.org/index.php/DIEC

dengan kinerja UMKM, meskipun pengaruhnya dapat berbeda berdasarkan faktor pendukung yang dimiliki pelaku usaha (Sholihah et al., 2023).

Proses penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi artikel jurnal yang relevan, klasifikasi literatur berdasarkan tema, metode, konteks, dan temuan penelitian, serta sintesis komparatif untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, dan keterbatasan hasil penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menyusun pemahaman konseptual mengenai hubungan antara penyaluran KUR berbasis digital, akses pembiayaan, perkembangan usaha, inklusi keuangan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena penelitian ini berbasis literatur, hasil analisis tidak dimaksudkan sebagai pengukuran dampak kausal secara langsung terhadap penerima KUR di wilayah tertentu.

Sumber data penelitian terdiri atas 15 artikel jurnal yang membahas penyaluran KUR, keuangan digital, inklusi keuangan, serta dampak pembiayaan mikro terhadap perkembangan usaha dan pengentasan kemiskinan. Literatur yang dikaji mencakup penelitian empiris dan kajian konseptual yang relevan dengan konteks Indonesia maupun internasional. Pemilihan sumber diarahkan pada empat tema utama, yaitu efektivitas dan mekanisme penyaluran KUR, peran teknologi finansial dalam memperluas layanan keuangan, akses pembiayaan bagi kelompok yang belum terlayani secara optimal, serta dampak pembiayaan mikro terhadap pendapatan, kinerja usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Relevansi tema tersebut didukung oleh penelitian tentang aksesibilitas KUR bagi pelaku usaha mikro (Suryawati et al., 2024) dan penelitian mengenai keterkaitan literasi keuangan, dukungan pemerintah, layanan keuangan digital, serta inklusi keuangan dengan kinerja UMKM (Sholihah et al., 2023).

Kelima belas artikel tersebut menjadi korpus literatur yang dianalisis dalam penelitian ini. Namun, jumlah tersebut merupakan kumpulan artikel yang digunakan untuk sintesis, bukan jumlah hasil pencarian awal yang telah melalui tahapan seleksi sistematis. Oleh karena itu, proses pemilihan artikel perlu dijelaskan secara transparan apabila penelitian ini akan dikembangkan menjadi tinjauan sistematis.

Analisis data dilakukan menggunakan sintesis tematik komparatif dengan mengidentifikasi tujuan penelitian, metode, konteks, dan temuan utama dari setiap artikel. Selanjutnya, hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan tema untuk membandingkan persamaan dan perbedaan temuan antarpublikasi. Analisis difokuskan pada hubungan antara mekanisme penyaluran KUR, pemanfaatan pembiayaan oleh pelaku usaha, perkembangan kinerja bisnis, dan perluasan akses terhadap layanan keuangan formal. Penelitian mengenai UMKM di Jawa Tengah, misalnya, menunjukkan bahwa literasi keuangan, dukungan pemerintah, adopsi layanan keuangan digital, dan inklusi keuangan berperan dalam menjelaskan kinerja usaha (Sholihah et al., 2023). Temuan tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan konseptual, bukan sebagai bukti langsung bahwa digitalisasi penyaluran KUR dengan sendirinya menyebabkan peningkatan pendapatan atau pengurangan kemiskinan.

Hasil sintesis kemudian digunakan untuk merumuskan pola hubungan antara akses pembiayaan, pemanfaatan modal produktif, keberlanjutan usaha, inklusi keuangan, dan kesejahteraan penerima manfaat. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi peluang dan kendala penyaluran KUR berbasis digital sekaligus merumuskan implikasi bagi pengembangan kebijakan pembiayaan UMKM yang lebih inklusif.

Kerangka analisis penelitian mencakup enam dimensi utama, yaitu efisiensi operasional, aksesibilitas, ketepatan sasaran, pengembangan usaha, inklusi keuangan, dan pengentasan kemiskinan. Efisiensi operasional dianalisis melalui waktu pemrosesan, biaya transaksi, dan penyederhanaan prosedur. Aksesibilitas dikaji berdasarkan jangkauan layanan, kemudahan pengajuan, dan kemampuan menjangkau kelompok yang belum terlayani. Dimensi ketepatan sasaran mencakup kesesuaian penerima dengan kriteria program, profil usaha, dan kebutuhan

Darunnajah *in* Economics
ISSN(Online): XXXX-XXXX
Vol 1 no 1 (2026): March 2026
https://journal.darunnajah.org/index.php/DIEC

modal produktif. Pentingnya dimensi aksesibilitas didukung oleh kajian Suryawati et al. (2024), yang menyoroti persoalan akses pembiayaan KUR bagi pelaku usaha mikro.

Dimensi pengembangan usaha dianalisis melalui pemanfaatan kredit, kapasitas produksi, omzet, keuntungan, dan keberlanjutan usaha. Sementara itu, inklusi keuangan mencakup akses dan penggunaan layanan keuangan formal, transaksi digital, serta literasi keuangan. Hubungan antara layanan keuangan digital, inklusi keuangan, dan kinerja UMKM menjadi landasan dalam menyusun dimensi tersebut (Sholihah et al., 2023). Adapun pengentasan kemiskinan dikaji melalui indikator konseptual berupa pendapatan rumah tangga, konsumsi, kepemilikan aset produktif, dan ketahanan ekonomi. Keenam dimensi ini merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk mengarahkan analisis literatur dan belum diposisikan sebagai instrumen pengukuran yang tervalidasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kajian Komparatif terhadap 15 Artikel Jurnal

Kajian terhadap literatur yang relevan memperlihatkan bahwa hubungan antara digitalisasi layanan keuangan, akses kredit, perkembangan UMKM, dan pengentasan kemiskinan perlu dipahami sebagai suatu proses yang terdiri atas beberapa tahapan. Digitalisasi dapat mempermudah akses dan mempercepat pelayanan, tetapi manfaat akhirnya bergantung pada kemampuan penerima memanfaatkan layanan keuangan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.

Untuk memperjelas pola temuan, 15 artikel berikut dibandingkan berdasarkan fokus penelitian, metode, dan kontribusinya terhadap evaluasi KUR berbasis digital. Berdasarkan 15 penelitian terdahulu yang dikaji, efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan layanan keuangan digital dapat dipahami melalui tiga aspek utama, yaitu akses pembiayaan, perkembangan usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Mustofa et al. (2024), melalui studi kasus kualitatif pada UMKM di Jember, menemukan bahwa KUR membantu pelaku usaha memperoleh modal untuk mendukung kegiatan produksi dan pemasaran. Namun, prosedur administrasi dan keterbatasan informasi masih menjadi hambatan. Sementara itu, Lubis et al. (2026), melalui kajian deskriptif penyaluran KUR BRI periode 2021–2024, menekankan bahwa efektivitas program berkaitan dengan pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, stabilitas regulasi, dan kesiapan operasional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan KUR tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pembiayaan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan program.

Dari aspek perkembangan usaha, Aturrohmah et al. (2026) melaporkan bahwa KUR dan faktor produksi lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Temuan ini memperlihatkan pentingnya pembiayaan dalam mendukung aktivitas ekonomi pelaku usaha. Akan tetapi, keberhasilan pembiayaan tetap bergantung pada pemanfaatan modal dan kemampuan pengelolaan usaha. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Banerjee et al. (2015) mengenai kredit mikro di India, yang menunjukkan bahwa kredit dapat meningkatkan investasi dan keuntungan pada sebagian usaha yang telah berjalan, tetapi tidak selalu menghasilkan peningkatan konsumsi yang signifikan. Dengan demikian, pemberian kredit perlu disertai pemanfaatan modal secara produktif agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Dalam konteks keuangan digital, Airlangga et al. (2025) menjelaskan bahwa fintech lending berpotensi memperluas akses pembiayaan bagi kelompok yang kurang terlayani, meskipun dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan bergantung pada kondisi sosial ekonomi. Airlangga et al. (2026) juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen, pengawasan regulasi, pengelolaan risiko teknologi, dan pendidikan keuangan dalam pelaksanaan pembiayaan digital. Sejalan dengan itu, Tay et al. (2022) menunjukkan bahwa

inklusi keuangan digital berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses dan rendahnya literasi keuangan. Ha et al. (2025) serta Sant'Anna dan Figueiredo (2024) turut menyoroti potensi fintech dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus pentingnya regulasi, stabilitas keuangan, dan perlindungan konsumen.

Hubungan antara inklusi keuangan dan pengurangan kemiskinan juga menjadi perhatian sejumlah penelitian. Suri dan Jack (2016), melalui penelitian tentang layanan uang elektronik M-PESA di Kenya, menemukan bahwa akses terhadap uang elektronik berkaitan dengan peningkatan konsumsi per kapita dan penurunan kemiskinan ekstrem. Sebaliknya, Duvendack dan Mader (2020) menunjukkan bahwa dampak program inklusi keuangan terhadap kemiskinan bervariasi, cenderung relatif kecil, dan tidak selalu menghasilkan perubahan yang transformatif. Biru (2024) juga melaporkan bahwa dampak rata-rata inisiatif inklusi keuangan terhadap konsumsi, pendapatan, aset, dan indikator kemiskinan cenderung positif, tetapi relatif kecil. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan merupakan salah satu faktor pendukung kesejahteraan, tetapi tidak secara otomatis menjamin pengurangan kemiskinan.

Penelitian Kim dan So (2018) mengenai layanan keuangan seluler dan pembangunan menunjukkan bahwa manfaat layanan keuangan dipengaruhi oleh model layanan dan kondisi lingkungan. Sementara itu, Kadir et al. (2026) menempatkan inklusi keuangan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang perlu dinilai berdasarkan konteks dan mekanisme dampaknya. Agustiningsih (2026) juga menekankan potensi fintech dalam memperkuat inklusi keuangan di Indonesia, dengan tetap memperhatikan literasi keuangan dan kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerataan akses layanan keuangan.

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas KUR berbasis digital tidak cukup diukur dari kecepatan penyaluran atau jumlah kredit yang diberikan. Evaluasi juga perlu memperhatikan kemudahan akses, ketepatan sasaran, penggunaan kredit secara produktif, perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, serta perubahan kesejahteraan penerima. Literasi keuangan, pendampingan usaha, akses pasar, dan perlindungan konsumen menjadi faktor pendukung yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model evaluasi yang menempatkan digitalisasi sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan, sedangkan perkembangan usaha dan pengurangan kemiskinan menjadi hasil yang diharapkan dan perlu dibuktikan melalui penelitian empiris.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa temuan penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga pola. Pertama, studi mengenai KUR di Indonesia cenderung menekankan pentingnya akses modal, prosedur penyaluran, dan dukungan terhadap perkembangan UMKM. Kedua, penelitian keuangan digital menunjukkan peluang peningkatan akses dan efisiensi layanan. Ketiga, studi mengenai kemiskinan memperlihatkan bahwa peningkatan akses kredit tidak selalu menghasilkan perubahan kesejahteraan dengan besaran yang sama.

Terdapat perbedaan mendasar antara hasil penelitian tentang uang elektronik, fintech lending, dan KUR. Uang elektronik terutama berkaitan dengan transaksi dan pengelolaan keuangan, fintech lending berhubungan dengan model pembiayaan berbasis teknologi, sedangkan KUR merupakan program kredit yang memiliki ketentuan serta tata kelola tersendiri. Oleh karena itu, hasil penelitian dari satu kategori tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti kausal mengenai kategori lainnya.

3.2 Efektivitas Penyaluran KUR Berbasis Digital

Darunnajah *in* Economics
ISSN(Online): XXXX-XXXX
Vol 1 no 1 (2026): March 2026
https://journal.darunnajah.org/index.php/DIEC

Efektivitas penyaluran KUR berbasis digital dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu efisiensi operasional, perluasan akses, dan ketepatan sasaran.

3.2.1 Efisiensi operasional

Digitalisasi berpotensi mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh layanan kredit. Penyampaian informasi melalui kanal digital, pengajuan dokumen secara elektronik, verifikasi data terintegrasi, serta pemantauan status pengajuan dapat mengurangi kebutuhan kunjungan berulang ke kantor layanan.

Potensi tersebut relevan dengan temuan Mustofa et al. (2024) mengenai kendala administrasi dan informasi dalam pelaksanaan KUR. Digitalisasi dapat menjadi salah satu solusi atas hambatan tersebut apabila sistem yang digunakan benar-benar menyederhanakan prosedur dan mudah diakses calon penerima.

Akan tetapi, keberadaan aplikasi tidak dengan sendirinya menjamin efisiensi. Sistem yang rumit, gangguan jaringan, pengulangan pengisian data, atau persyaratan dokumen yang sulit dipenuhi justru dapat meningkatkan beban pengguna. Oleh karena itu, evaluasi perlu membandingkan waktu pemrosesan, biaya transaksi, tingkat keberhasilan pengajuan, dan jumlah tahapan pelayanan sebelum dan sesudah digitalisasi.

Implikasi evaluatif: keberhasilan digitalisasi harus diukur dari perbaikan proses yang dialami penerima, bukan hanya dari jumlah layanan yang telah dipindahkan ke platform digital.

3.2.2 Perluasan akses pembiayaan

Salah satu tujuan utama digitalisasi adalah memperluas jangkauan layanan keuangan kepada kelompok yang sebelumnya sulit menjangkau lembaga perbankan. Kanal digital berpotensi membantu pelaku UMKM di perdesaan, usaha rumahan, dan usaha mikro yang menghadapi kendala geografis.

Tay et al. (2022) menjelaskan bahwa inklusi keuangan digital berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi kesenjangan penggunaan layanan antara kelompok masyarakat masih menjadi tantangan. Hal ini berarti bahwa digitalisasi KUR harus disertai strategi inklusi yang secara khusus memperhatikan kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha dengan keterampilan digital terbatas.

Selain akses internet, kemampuan menggunakan aplikasi, memahami persyaratan kredit, dan menyediakan dokumen usaha dapat memengaruhi keberhasilan pengajuan. Apabila proses seleksi digital lebih mudah bagi usaha yang telah memiliki pencatatan keuangan lengkap, sebagian usaha informal justru berisiko tetap tidak terlayani.

Dengan demikian, perluasan akses sebaiknya diukur melalui proporsi penerima baru dari kelompok yang sebelumnya tidak terlayani, distribusi geografis penyaluran, tingkat keberhasilan pengajuan, serta perbedaan akses menurut skala usaha, gender, dan tingkat pendapatan.

3.2.3 Ketepatan sasaran penerima

Efektivitas KUR tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya penyaluran kredit. Penyaluran perlu menjangkau pelaku usaha yang memenuhi ketentuan program dan membutuhkan pembiayaan produktif.

Pemanfaatan data digital berpotensi membantu proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan penerima. Namun, keputusan berbasis data juga dapat menghasilkan bias apabila kelompok tertentu tidak memiliki rekam transaksi digital atau dokumentasi usaha yang memadai.

Karena itu, proses digital perlu menggabungkan verifikasi data yang proporsional, mekanisme koreksi ketika data tidak lengkap, dan bantuan bagi calon penerima yang kesulitan menggunakan sistem. Evaluasi ketepatan sasaran juga harus membedakan kredit yang

Darunnajah *in* Economics
ISSN(Online): XXXX-XXXX
Vol 1 no 1 (2026): March 2026
https://journal.darunnajah.org/index.php/DIEC

disalurkan kepada penerima baru dari kredit yang diberikan kepada nasabah yang sebelumnya sudah memiliki akses pembiayaan formal.

Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi tidak hanya mempercepat pelayanan kepada nasabah yang sudah terjangkau, tetapi juga memperluas kesempatan kelompok yang selama ini menghadapi hambatan.

3.3 Kontribusi Digitalisasi KUR terhadap Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan mencakup lebih dari kepemilikan rekening atau keberhasilan memperoleh kredit. Inklusi juga berkaitan dengan kemampuan mengakses dan menggunakan layanan keuangan formal secara berkelanjutan, aman, dan sesuai kebutuhan.

Digitalisasi KUR dapat mendukung inklusi melalui beberapa mekanisme. Pertama, layanan digital mengurangi sebagian hambatan geografis. Kedua, dokumentasi transaksi dapat membantu pelaku usaha membangun rekam jejak keuangan. Ketiga, integrasi layanan kredit dengan pembayaran dan pencatatan usaha dapat membantu pengelolaan arus kas. Keempat, interaksi berkelanjutan dengan lembaga keuangan berpotensi meningkatkan pemahaman penerima mengenai produk keuangan formal.

Penelitian Suri dan Jack (2016) memberikan bukti bahwa layanan keuangan digital dapat meningkatkan ketahanan keuangan rumah tangga. Namun, hasil tersebut berkaitan dengan layanan uang elektronik di Kenya, bukan penyaluran KUR. Relevansinya bagi penelitian ini terletak pada mekanisme yang mungkin menghubungkan akses digital dengan kemampuan mengelola risiko dan kegiatan ekonomi, bukan pada kesamaan program.

Kajian Ha et al. (2025) dan Sant'Anna dan Figueiredo (2024) juga menekankan pentingnya memahami hubungan antara inovasi teknologi, inklusi, dan risiko. Dalam konteks KUR, hal tersebut berarti bahwa peningkatan penggunaan layanan digital perlu disertai keamanan data, transparansi biaya, kejelasan persyaratan, dan perlindungan penerima dari praktik pembiayaan yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, indikator inklusi keuangan sebaiknya tidak berhenti pada jumlah penerima KUR. Pengukuran perlu mencakup apakah penerima memperoleh akses yang sebelumnya tidak dimiliki, apakah mereka mampu menggunakan layanan secara mandiri, dan apakah akses tersebut memperkuat kemampuan mereka mengelola keuangan usaha.

3.4 Peran KUR terhadap Pengembangan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan

Hubungan antara KUR dan pengentasan kemiskinan dapat dijelaskan melalui mekanisme bertahap. Kredit menyediakan modal, modal digunakan untuk kegiatan produktif, kegiatan produktif berpotensi meningkatkan kapasitas dan pendapatan usaha, kemudian perubahan pendapatan dapat memengaruhi konsumsi dan kesejahteraan rumah tangga.

Akan tetapi, setiap tahapan dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Kredit yang tersedia belum tentu digunakan untuk investasi produktif. Investasi yang produktif belum tentu menghasilkan keuntungan apabila permintaan pasar rendah. Peningkatan keuntungan juga belum tentu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan jika usaha menghadapi risiko tinggi atau rumah tangga memiliki beban pengeluaran yang besar.

Banerjee et al. (2015) menunjukkan bahwa kredit mikro dapat meningkatkan investasi dan keuntungan sebagian usaha tanpa menghasilkan peningkatan konsumsi yang signifikan. Sementara itu, Suri dan Jack (2016) menemukan hasil yang lebih kuat pada konteks layanan uang elektronik di Kenya, yang berkaitan dengan peningkatan konsumsi dan pengurangan kemiskinan ekstrem.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa dampak layanan keuangan dipengaruhi oleh jenis layanan, karakteristik penerima, penggunaan dana, dan konteks ekonomi. Karena itu, temuan positif pada satu program tidak dapat digeneralisasikan secara langsung kepada semua program kredit.

Darunnajah *in* Economics
ISSN(Online): XXXX-XXXX
Vol 1 no 1 (2026): March 2026
https://journal.darunnajah.org/index.php/DIEC

Bagi KUR, kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dapat diperkuat apabila pembiayaan diikuti dengan: Penggunaan dana untuk kegiatan usaha yang produktif dan sesuai kebutuhan. Pendampingan pengelolaan keuangan dan pencatatan usaha. Peningkatan kemampuan pemasaran dan akses ke rantai pasok. Penguatan literasi digital dan pemahaman kewajiban kredit. Pemantauan perkembangan pendapatan usaha dan kesejahteraan rumah tangga.

Dalam kerangka tersebut, KUR berpotensi menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Perbedaan hasil penelitian dapat dijelaskan dengan membedakan tiga jenis keluaran.

Pertama, keluaran program, seperti jumlah pengajuan, jumlah kredit yang disalurkan, dan waktu pemrosesan. Kedua, hasil ekonomi antara, seperti peningkatan modal kerja, produksi, omzet, dan keuntungan. Ketiga, dampak kesejahteraan, seperti perubahan konsumsi rumah tangga, aset produktif, ketahanan ekonomi, dan status kemiskinan.

Keluaran program dapat berubah lebih cepat dibandingkan dampak kesejahteraan. Peningkatan jumlah kredit digital, misalnya, dapat menunjukkan bahwa layanan telah digunakan lebih luas. Namun, indikator tersebut belum menjawab apakah penerima berhasil mengembangkan usahanya atau meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Biru (2024) menemukan bahwa dampak rata-rata inisiatif inklusi keuangan terhadap pendapatan, konsumsi, aset, dan indikator kemiskinan cenderung positif tetapi relatif kecil. Duvendack dan Mader (2020) juga menunjukkan bahwa hasil program inklusi keuangan bervariasi dan tidak selalu menghasilkan perubahan ekonomi yang besar.

Temuan tersebut tidak berarti bahwa program pembiayaan tidak bermanfaat. Sebaliknya, hasil tersebut menekankan perlunya mengidentifikasi kondisi yang membuat kredit produktif menghasilkan manfaat lebih besar dan berkelanjutan.

Evaluasi efektivitas KUR berbasis digital dapat dilakukan melalui enam aspek utama. Pertama, efisiensi layanan, yaitu menilai sejauh mana digitalisasi dapat mengurangi hambatan administrasi dan transaksi. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur waktu pemrosesan, biaya layanan, dan keberhasilan pengajuan kredit.

Kedua, akses keuangan, yaitu menilai kemampuan kanal digital dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah penerima KUR, tetapi juga pada keterjangkauan layanan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh akses pembiayaan.

Ketiga, kinerja usaha, yaitu menilai sejauh mana kredit mendukung investasi dan perkembangan UMKM. Aspek ini dapat diukur melalui penggunaan dana, perubahan omzet dan keuntungan, serta keberlanjutan usaha setelah memperoleh pembiayaan.

Keempat, kesejahteraan, yaitu menilai perubahan kondisi ekonomi penerima KUR, seperti pendapatan, konsumsi, dan tingkat kerentanan ekonomi. Dampak pembiayaan terhadap kesejahteraan dan kemiskinan dapat bervariasi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penyaluran kredit tidak dapat secara langsung dianggap sebagai bukti keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Kelima, kesetaraan akses, yaitu menilai apakah seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang memadai untuk memanfaatkan layanan keuangan digital. Kesenjangan akses teknologi dan literasi digital dapat membatasi manfaat program. Karena itu, pendampingan dan penyediaan kanal layanan alternatif perlu dipertimbangkan agar kelompok yang mengalami keterbatasan akses tetap dapat memperoleh pembiayaan.

Keenam, keberlanjutan, yaitu menilai kemampuan penerima dalam mempertahankan usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Evaluasi mencakup kemampuan

Darunnajah *in* Economics
ISSN(Online): XXXX-XXXX
Vol 1 no 1 (2026): March 2026
https://journal.darunnajah.org/index.php/DIEC

membayar angsuran, risiko utang, perlindungan konsumen, serta ketahanan usaha dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, keenam aspek tersebut menunjukkan bahwa evaluasi KUR berbasis digital perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari efisiensi layanan dan pemerataan akses hingga perkembangan usaha dan kesejahteraan penerima. Dengan pendekatan ini, efektivitas program tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan penyaluran kredit, tetapi juga berdasarkan manfaat ekonomi yang diperoleh penerima serta keberlanjutan usaha mereka.

3.6 Hambatan dan Risiko Penyaluran KUR Berbasis Digital

Digitalisasi penyaluran KUR berpotensi meningkatkan efisiensi, tetapi terdapat sejumlah hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya.

Pertama, kesenjangan digital. Keterbatasan perangkat, jaringan internet, dan keterampilan digital dapat menghambat akses sebagian pelaku UMKM. Apabila tidak diatasi, digitalisasi berisiko lebih menguntungkan kelompok yang sudah memiliki kemampuan teknologi.

Kedua, keterbatasan dokumentasi usaha. Sebagian usaha mikro belum mempunyai pencatatan transaksi, laporan keuangan, atau dokumentasi usaha yang memadai. Sistem penilaian yang terlalu bergantung pada data digital dapat mempersulit kelompok tersebut memperoleh pembiayaan.

Ketiga, risiko keamanan dan privasi data. Penggunaan dokumen identitas dan data transaksi membutuhkan pengamanan, pembatasan akses, dan transparansi pemanfaatan informasi. Kepercayaan penerima merupakan salah satu prasyarat penting bagi penggunaan layanan digital secara berkelanjutan.

Keempat, risiko pembiayaan berlebihan. Kemudahan akses tidak boleh mendorong pemberian kredit tanpa penilaian kemampuan membayar. Penyaluran yang efektif harus tetap memperhatikan kelayakan usaha dan keberlanjutan kewajiban kredit.

Kelima, keterbatasan literasi keuangan. Penerima yang tidak memahami biaya, jadwal pembayaran, risiko keterlambatan, atau penggunaan kredit produktif dapat menghadapi kesulitan dalam mengelola pembiayaan.

Kajian Airlangga et al. (2026) menekankan pentingnya keterpaduan perlindungan konsumen, pengawasan regulasi, pengelolaan risiko teknologi, dan pendidikan keuangan. Kerangka tersebut relevan untuk memastikan bahwa digitalisasi KUR tidak hanya mempercepat proses penyaluran, tetapi juga menjaga keberlanjutan manfaat bagi penerima.

Berdasarkan sintesis 15 artikel, penelitian ini mengusulkan model evaluasi yang menempatkan digitalisasi sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), bukan sebagai tujuan akhir program. Digitalisasi diharapkan dapat mempermudah proses pengajuan kredit, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Namun, akses pembiayaan masih menghadapi kendala, terutama bagi usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan prosedur penyaluran KUR (Suryawati et al., 2024).

Alur model dimulai dari digitalisasi penyaluran KUR, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pembiayaan. Tahap berikutnya adalah memastikan ketepatan sasaran, sehingga kredit diterima oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan membutuhkan modal produktif. Kredit tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan usaha, seperti menambah bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pemasaran. Apabila dikelola dengan baik, pembiayaan berpotensi meningkatkan kinerja dan keberlanjutan UMKM. Penelitian Sholihah et al. (2023) menunjukkan bahwa adopsi layanan

Darunnajah *in* Economics
ISSN(Online): XXXX-XXXX
Vol 1 no 1 (2026): March 2026
https://journal.darunnajah.org/index.php/DIEC

keuangan digital, inklusi keuangan, literasi keuangan, dan dukungan pemerintah berkaitan dengan kinerja keuangan UMKM.

Keberhasilan model juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu literasi keuangan dan digital, pendampingan usaha, akses pasar, serta perlindungan konsumen dan tata kelola penyaluran kredit. Faktor-faktor tersebut membantu pelaku usaha memanfaatkan pembiayaan secara tepat dan mengelola usahanya secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya kinerja usaha, pendapatan pelaku UMKM berpotensi meningkat dan ketahanan ekonomi rumah tangga dapat menjadi lebih baik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut diharapkan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, pengurangan kemiskinan tidak terjadi secara otomatis karena turut dipengaruhi kondisi pasar, kemampuan pengelolaan usaha, dan faktor ekonomi lainnya.

Secara sederhana, alur model evaluasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Model konseptual yang dikembangkan penulis berdasarkan sintesis literatur.

Berdasarkan alur tersebut, evaluasi efektivitas KUR berbasis digital dapat difokuskan pada enam aspek, yaitu efisiensi penyaluran, kemudahan akses, ketepatan sasaran, pemanfaatan kredit, perkembangan usaha, dan perubahan kondisi ekonomi penerima. Evaluasi empiris dapat dilakukan dengan menganalisis data penerima KUR, penggunaan layanan digital, perkembangan omzet dan keuntungan usaha, serta perubahan pendapatan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan. Untuk menilai dampak program secara lebih meyakinkan, penelitian

Darunnajah *in* Economics
ISSN(Online): XXXX-XXXX
Vol 1 no 1 (2026): March 2026
https://journal.darunnajah.org/index.php/DIEC

juga perlu mempertimbangkan faktor lain yang dapat memengaruhi perkembangan usaha dan pendapatan penerima.

Dengan demikian, model ini menegaskan bahwa efektivitas KUR berbasis digital tidak cukup dinilai dari keberhasilan penggunaan teknologi atau jumlah kredit yang disalurkan, tetapi juga perlu memperhatikan manfaat pembiayaan bagi perkembangan usaha dan kesejahteraan penerima. Model ini masih bersifat konseptual, sehingga hubungan sebab-akibat antara digitalisasi, perkembangan UMKM, dan pengurangan kemiskinan perlu diuji melalui penelitian empiris.

Hasil kajian memberikan beberapa implikasi bagi pemerintah, lembaga penyalur, dan pendamping UMKM.

Pertama, pemerintah dan lembaga penyalur perlu mengembangkan sistem pemantauan yang mengintegrasikan indikator penyaluran, akses kelompok sasaran, kinerja usaha, dan kesejahteraan penerima. Penilaian program sebaiknya tidak hanya berorientasi pada target penyaluran tahunan.

Kedua, layanan digital perlu dilengkapi pendampingan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan literasi digital. Kanal tatap muka atau bantuan melalui petugas tetap dapat diperlukan untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak menciptakan hambatan baru.

Ketiga, pembiayaan perlu dihubungkan dengan program pengembangan usaha, termasuk pencatatan keuangan, peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, dan perluasan akses pasar. Pendekatan ini dapat memperbesar peluang agar kredit digunakan secara produktif.

Keempat, perlindungan konsumen harus menjadi bagian dari desain digitalisasi, mencakup keamanan data, transparansi persyaratan, informasi kewajiban pembayaran, dan mekanisme pengaduan.

Kelima, evaluasi dampak perlu menggunakan data yang memadai untuk membedakan perubahan yang terjadi setelah penerimaan KUR dari perubahan yang benar-benar disebabkan oleh program. Apabila memungkinkan, evaluasi dapat menggunakan data panel penerima dan kelompok pembanding yang sebanding.

Dengan pendekatan tersebut, efektivitas KUR berbasis digital dapat dinilai secara lebih menyeluruh: bukan hanya seberapa cepat kredit disalurkan, melainkan juga siapa yang memperoleh akses, bagaimana kredit digunakan, dan apakah pembiayaan membantu memperbaiki kondisi ekonomi penerima.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025 dengan menggunakan pendekatan event study melalui indikator abnormal return dan Trading Volume Activity (TVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perusahaan BUMN.

Berdasarkan kajian komparatif terhadap 15 artikel jurnal, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pembiayaan, memperluas inklusi keuangan, dan mendukung pengembangan UMKM. Pemanfaatan teknologi digital dapat mengurangi hambatan geografis, menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan efisiensi transaksi, dan membantu proses pemantauan pembiayaan. Meskipun demikian, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh keterjangkauan layanan, ketepatan sasaran, kualitas tata kelola, dan kemampuan penerima memanfaatkan kredit.

Dalam aspek inklusi keuangan, digitalisasi dapat membuka peluang bagi pelaku usaha yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Akan tetapi, kesenjangan infrastruktur digital, keterampilan teknologi, dan literasi keuangan dapat

menyebabkan manfaat layanan belum dirasakan secara merata. Oleh karena itu, perluasan layanan digital perlu disertai pendampingan, penyederhanaan prosedur, dan penyediaan mekanisme bantuan bagi kelompok yang belum memiliki kemampuan digital memadai.

Dalam aspek pengentasan kemiskinan, kajian menunjukkan bahwa pembiayaan produktif dapat mendukung investasi dan perkembangan usaha, tetapi tidak selalu menghasilkan peningkatan pendapatan, konsumsi, dan kesejahteraan dalam besaran yang sama. Dampak KUR terhadap pengurangan kemiskinan bergantung pada penggunaan kredit, kemampuan manajerial penerima, akses pasar, kondisi ekonomi, serta keberlanjutan usaha. Dengan demikian, peningkatan jumlah kredit yang disalurkan tidak dapat secara langsung ditafsirkan sebagai keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Kontribusi utama artikel ini adalah pengembangan kerangka evaluasi yang mengintegrasikan enam dimensi, yaitu efisiensi operasional, aksesibilitas, ketepatan sasaran, pengembangan usaha, inklusi keuangan, dan perubahan kesejahteraan. Kerangka ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan evaluasi empiris KUR berbasis digital yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Airlangga, T., Sunitiyoso, Y., & Sudrajad, O. Y. (2025). The role of fintech lending in financial inclusion and poverty alleviation: A systematic review. International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities, 8(2). https://doi.org/10.31098/ijmesh.v8i2.3115

Airlangga, T., Sunitiyoso, Y., & Sudrajad, O. Y. (2026). Assessing the impact of digital and fintech lending on poverty alleviation in Indonesia: A soft systems approach. Systems Research and Behavioral Science, 43(4), 1380–1400. https://doi.org/10.1002/sres.70037

Aturrohmah, F., Ayuningtyas, F. J., Mulyatun, S., & Anggrismono. (2026). Konstribusi penyaluran Kredit Usaha Rakyat, tenaga kerja, legalitas usaha, dan modal sendiri dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Jurnal Aplikasi Bisnis, 23(1). https://doi.org/10.20885/jabis.vol23.iss1.art1

Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2015). The miracle of microfinance? Evidence from a randomized evaluation. American Economic Journal: Applied Economics, 7(1), 22–53. https://doi.org/10.1257/app.20130533

Biru, A. (2024). The impact of financial inclusion initiatives: Evidence from meta-analysis. Journal of International Development, 36(8), 2926–2958. https://doi.org/10.1002/jid.3943

Duvendack, M., & Mader, P. (2020). Impact of financial inclusion in low- and middle-income countries: A systematic review of reviews. Journal of Economic Surveys, 34(3), 594–629. https://doi.org/10.1111/joes.12367

Ha, D., Le, P., & Nguyen, D. K. (2025). Financial inclusion and fintech: A state-of-the-art systematic literature review. Financial Innovation, 11, Article 69. https://doi.org/10.1186/s40854-024-00741-0

Kadir, R. D., Muhibbuddin, Katili, C. Y., & Fadhilah, N. (2026). Financial inclusion and poverty reduction: A systematic review of literature in ASEAN. Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6303009

Kim, J., & So, [inisial dan nama lengkap perlu diverifikasi]. (2018). Mobile financial services, financial inclusion, and development: A systematic review of academic literature. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 84(5), e12044. https://doi.org/10.1002/isd2.12044

Lubis, S. A., Sinambela, A., Adrilia Br Sitepu, C. R., Simangunsong, H. D., Febiola, L., Putri, N. A., Husna, S. S., & Hidayat, N. (2026). Efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dalam mendukung UMKM tahun 2021–2024. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Indonesia, 2(1), 170–183. https://doi.org/10.63822/dkjv8m66

Mustofa, M., Maghfiroh, A., & Musaiyadi, M. (2024). Efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendorong masyarakat UMKM di Kabupaten Jember pada Bank Rakyat Indonesia. Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi. https://ejournal.stiekia.ac.id/index.php/JUMPA/article/view/248

Sant'Anna, D. A. L. M., & Figueiredo, P. N. (2024). Fintech innovation: Is it beneficial or detrimental to financial inclusion and financial stability? A systematic literature review and research directions. Emerging Markets Review, 60, Article 101140. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2024.101140

Suri, T., & Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. Science, 354(6317), 1288–1292. https://doi.org/10.1126/science.aah5309

Tay, L.-Y., Tai, H.-T., & Tan, G.-S. (2022). Digital financial inclusion: A gateway to sustainable development. Heliyon, 8(6), Article e09766. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09766

Agustiningsih, W. (2026). Dampak adopsi FinTech dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia: Pendekatan systematic literature review. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 6(2). https://doi.org/10.29303/risma.v6i2.3245